

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

PORTOFOLIO

Dosen Pengampu:

Dr. Pujiati, M.Pd.

Mega Metalia, S.E, M.Si., M.S.Ak., Ak, C.A

Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd.



Disusun Oleh:

Kelompok 9

Fani Dimas Prasetyo 2313031047

Nur Ayu Dila 2313031055

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI

UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

ARTIKEL 1

A. Identitas Artikel

Judul Artikel : Akuntansi Sektor Publik: Mengelola Keuangan Pemerintah dengan Transparansi dan Akuntabilitas
Publikasi : BAS Telkom University
Tahun : 2024
Penulis : Ikhsan Hakim
Website : <https://bas.telkomuniversity.ac.id/akuntansi-sektor-publik-mengelola-keuangan-pemerintah-dengan-transparansi-dan-akuntabilitas/>

B. Analisis Artikel

Artikel ini menjelaskan bahwa akuntansi sektor publik berperan penting sebagai alat untuk memastikan pengelolaan keuangan pemerintah dilakukan secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Penjelasan tentang penggunaan basis akrual, penyusunan anggaran yang terstruktur, serta penyajian laporan keuangan seperti neraca, laporan operasional, dan arus kas menunjukkan bahwa akuntansi bukan hanya proses administratif, tetapi mekanisme kontrol yang menjaga agar dana publik digunakan sesuai tujuan. Penekanan pada pemanfaatan teknologi seperti sistem informasi akuntansi dan analisis data juga memperlihatkan bahwa modernisasi menjadi bagian penting dari peningkatan kualitas pelaporan pemerintah. Dengan dukungan teknologi, proses pencatatan dan pelaporan menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah diawasi sehingga mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Artikel ini masih memberikan ruang bagi pemahaman yang lebih luas terkait tantangan penerapan akuntansi sektor publik di Indonesia. Banyak instansi pemerintah yang menghadapi kendala seperti kapasitas SDM yang belum merata, infrastruktur digital yang belum sepenuhnya memadai, serta budaya birokrasi yang masih kurang mendukung praktik keterbukaan informasi. Selain itu, peran pengawasan eksternal dari audit, masyarakat, dan media menjadi faktor penting dalam memastikan laporan keuangan tidak hanya rapi di atas kertas, tetapi benar-benar mencerminkan kondisi penggunaan anggaran di lapangan. Perbedaan kondisi antara pemerintah pusat dan daerah juga menunjukkan adanya kesenjangan implementasi, sehingga kualitas penerapan akuntansi sektor publik sering kali tidak konsisten. Dengan mempertimbangkan kompleksitas tersebut, analisis terhadap akuntansi sektor publik menjadi lebih kaya karena memperlihatkan bahwa keberhasilan transparansi dan akuntabilitas tidak hanya bergantung pada sistem yang baik, tetapi juga pada kesiapan sumber daya, budaya organisasi, dan pengawasan yang berkelanjutan.

Kesimpulannya, akuntansi sektor publik hanya dapat berfungsi optimal jika transparansi, akuntabilitas, dan dukungan teknologi berjalan seiring. Penggunaan basis akrual, laporan keuangan yang jelas, serta kesiapan SDM dan infrastruktur menjadi faktor

penting agar pengelolaan dana publik benar-benar efektif dan dapat diawasi. Ketika semua unsur ini terpenuhi, kepercayaan masyarakat meningkat dan tata kelola pemerintahan menjadi lebih bertanggung jawab.

ARTIKEL 2

A. Identitas Artikel

Judul Artikel : Masa Depan Akuntansi Sektor Publik: Tantangan dan Inovasi di Era Digital
Publikasi : Retizen
Tahun : 2025
Penulis : Kenneth Setiawan
Website : <https://retizen.republika.co.id/posts/728883/masa-depan-akuntansi-sektor-publik-tantangan-dan-inovasi-di-era-digital>

B. Analisis Artikel

Artikel tersebut menggambarkan bahwa akuntansi sektor publik sedang bergerak menuju era baru yang ditandai oleh penggunaan teknologi digital seperti big data, artificial intelligence, machine learning, dan blockchain. Teknologi-teknologi ini dinilai mampu meningkatkan transparansi, kecepatan pelaporan, serta efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah dengan menyediakan analisis data secara real-time dan mengotomatiskan pekerjaan administratif. Selain itu, akuntansi publik dianggap akan semakin menekankan aspek keberlanjutan dan etika, sehingga laporan keuangan tidak hanya berfokus pada angka tetapi juga dampak sosial dan lingkungan dari kebijakan publik.

Walaupun begitu, perubahan tersebut tidak dapat berjalan mulus tanpa kesiapan infrastruktur, kompetensi sumber daya manusia, dan keamanan sistem. Banyak instansi pemerintah yang masih menghadapi kesenjangan teknologi, keterbatasan literasi digital, serta budaya kerja birokratis yang membuat adopsi inovasi tidak selalu berjalan cepat. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa masa depan akuntansi sektor publik memang menjanjikan, tetapi membutuhkan pendekatan bertahap dan penguatan kelembagaan agar manfaat teknologi benar-benar dapat dioptimalkan dalam meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik.

Kesimpulannya, artikel ini menegaskan bahwa masa depan akuntansi sektor publik akan bergerak menuju sistem yang lebih modern, transparan, dan berbasis teknologi digital, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kemampuan SDM, dan penguatan regulasi. Transformasi ini menjanjikan peningkatan akuntabilitas dan efisiensi, namun harus dilakukan secara bertahap dan terarah agar inovasi benar-benar memberikan dampak nyata bagi pengelolaan keuangan publik.

ARTIKEL 3

A. Identitas Artikel

Judul Artikel : Masa Depan Akuntansi: Batasan Baru Teknologi dan Keamanan Siber
Publikasi : wartaekonomi
Tahun : 2019
Penulis : Rosmayanti
Website : <https://wartaekonomi.co.id/read217566/masa-depan-akuntansi-batasan-baru-teknologi-dankeamanan-siber>

B. Analisis Artikel

Masa depan akuntansi berada di persimpangan transformasi teknologi dan tantangan keamanan siber. Otomatisasi proses akuntansi, kemajuan komputasi awan, serta akses digital yang semakin luas membawa kemudahan dalam pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan. Di sisi lain, kemajuan ini juga membuka celah bagi berbagai risiko siber, termasuk pembobolan data, malware, fraud pembayaran, serta manipulasi informasi keuangan. Akuntan masa kini tidak lagi hanya bertugas mengolah angka, melainkan dituntut untuk memahami aspek keamanan digital dan mampu membantu organisasi mendeteksi, mencegah, serta merespons potensi risiko siber agar integritas data dan reputasi entitas tetap terjaga.

Selain itu, perkembangan teknologi menuntut penerapan standar keamanan yang lebih ketat dan pemahaman yang mendalam terhadap regulasi terkait data, baik lokal maupun internasional. Integrasi sistem digital dalam proses akuntansi memungkinkan informasi keuangan lebih cepat diakses dan dianalisis, tetapi sekaligus meningkatkan kompleksitas pengelolaan data dan risiko kesalahan. Akuntan harus berperan aktif dalam memastikan bahwa teknologi yang digunakan selaras dengan prosedur keamanan, protokol audit, dan regulasi yang berlaku, sehingga potensi kebocoran atau manipulasi informasi dapat diminimalkan. Kemampuan untuk menyeimbangkan efisiensi teknologi dengan keamanan data menjadi kunci utama bagi keberhasilan fungsi akuntansi di era digital.

Tantangan nyata bagi dunia akuntansi ke depan bukan hanya soal penguasaan teknologi, tetapi juga kebutuhan akan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi luas. Selain memahami angka, akuntan harus memiliki kemampuan analitis, pemahaman risiko digital, kemampuan komunikasi yang efektif, serta kepekaan terhadap etika dan kepatuhan regulasi. Di Indonesia, kekurangan akuntan profesional dibandingkan kebutuhan nyata di sektor publik maupun swasta dapat menghambat upaya menjaga akuntabilitas dan keamanan sektor keuangan, khususnya pada usaha kecil dan menengah. Masa depan akuntansi menuntut adaptasi ganda: menguasai teknologi modern sekaligus meningkatkan kompetensi manusia agar fungsi akuntansi tetap relevan, andal, dan aman di tengah arus digital yang terus berkembang

ANALISIS JURNAL NASIONAL 1

A. Identitas Jurnal

Nama Jurnal : Jurnal Manajemen dan Akuntansi
Judul Jurnal : Pengembangan Akuntansi Keuangan Pada Sektor Publik
Nama Penulis : Agung Suprianto, Deliza Elda Alifah, Muhammad Vikri Subiyakto, Alamul Huda, Tiara Safitri Dewi
Volume : 1
Nomor : 4
Halaman : 96-103
Tahun Terbit : 2024

B. Analisis Jurnal

Penelitian ini membahas pentingnya pengembangan akuntansi keuangan di sektor publik sebagai respons terhadap tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan dana publik. Latar belakang munculnya tulisan ini karena pengelolaan keuangan publik membutuhkan mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban yang lebih baik terutama di era modern, di mana tuntutan publik terhadap kualitas tata kelola pemerintahan semakin tinggi. Oleh karena itu, akuntansi sektor publik dipandang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan Negara daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengembangan akuntansi keuangan pada sektor public, melihat bagaimana akuntansi sektor publik berkembang, apa saja komponen ataupun aspek baru termasuk integrasi teknologi, akurasi pelaporan, dan manajemen risiko serta bagaimana peran pengembangan tersebut dalam memperbaiki transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan publik.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengembangan akuntansi sektor publik saat ini memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik. Hal ini mencakup peningkatan transparansi, peningkatan akuntabilitas, serta efektivitas dalam pengelolaan dana publik. Selain itu, penelitian menunjukkan kecenderungan bahwa pengembangan tersebut melibatkan integrasi teknologi dalam pelaporan keuangan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi, serta penekanan pada pertanggungjawaban dan pengelolaan risiko dalam pengelolaan dana publik.

Penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan akuntansi keuangan di sektor publik merupakan alat penting untuk memperbaiki tata kelola keuangan publik dengan manfaat nyata dalam transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Dengan terus mengatasi tantangan dan mengadopsi inovasi (termasuk teknologi), akuntansi sektor publik dapat menjadi aset berharga bagi pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan keuangan publik yang lebih baik, transparan, akuntabel, dan efisien.

ANALISIS JURNAL NASIONAL 2

A. Identitas Jurnal

Nama Jurnal : Jurnal Rimba : Riset Ilmu manajemen Bisnis dan Akuntansi
Judul Jurnal : Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Good Governance Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah
Nama Penulis : Neneng Karlina, Trisna Sary Lewaru, Dwi Kriswantini
Volume : 1
Nomor : 3
Halaman : 300-306
Tahun Terbit : 2023

B. Analisis Jurnal

Penelitian ini membahas secara mendalam bagaimana penerapan akuntansi sektor publik, prinsip good governance, dan pengawasan internal memengaruhi kinerja instansi pemerintah. Fokus utama penelitian adalah menilai sejauh mana ketiga aspek tersebut berperan dalam menciptakan pengelolaan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan melibatkan responden dari instansi pemerintah daerah, penelitian ini berupaya menggambarkan kondisi aktual penerapan akuntansi dan tata kelola di lingkungan birokrasi. Penerapan akuntansi sektor publik dipandang sebagai elemen penting karena menyediakan sistem pencatatan dan pelaporan yang jelas sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih terukur. Good governance di sisi lain memberikan kerangka untuk membangun tata kelola yang bersih, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan publik.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik dan good governance berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja instansi pemerintah. Hal ini disebabkan oleh kemampuan kedua aspek tersebut dalam menciptakan sistem kerja yang lebih tertata, meminimalkan kesalahan administrasi, dan memperkuat akuntabilitas publik. Penerapan akuntansi yang baik membuat proses penyusunan laporan keuangan lebih dapat dipertanggungjawabkan, sementara prinsip good governance seperti transparansi, partisipasi, dan integritas mendorong terciptanya budaya kerja yang lebih profesional. Namun, penelitian ini menemukan bahwa pengawasan internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Kondisi ini dapat diartikan bahwa fungsi pengawasan internal di beberapa instansi belum berjalan optimal, masih bersifat formalitas, atau tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mendorong perubahan perilaku organisasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam literatur akuntansi sektor publik karena menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola dan penerapan akuntansi yang kuat merupakan fondasi utama peningkatan kinerja birokrasi. Meskipun

demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup sampel yang terbatas sehingga temuan belum tentu mencerminkan kondisi di semua instansi pemerintahan. Penggunaan data berbasis persepsi juga menghadirkan potensi bias yang dapat memengaruhi objektivitas hasil penelitian. Kendati demikian, penelitian ini tetap relevan dan bermanfaat sebagai rujukan untuk penelitian lanjutan serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengevaluasi dan memperbaiki sistem akuntansi, tata kelola, serta efektivitas pengawasan internal di lingkungan instansi pemerintah.

ANALISIS JURNAL NASIONAL 3

A. Identitas Jurnal

Nama Jurnal : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Judul Jurnal : Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jawa Timur
Nama Penulis : Muhammad Rendi Oktavianto
Volume : 6
Nomor : 4
Halaman : 994-1001
Tahun Terbit : 2023

B. Analisis Jurnal

Penelitian ini membahas hubungan antara penerapan akuntansi sektor publik dan mekanisme pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan serta implikasinya bagi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Jawa Timur. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana sistem akuntansi yang dijalankan pemerintah dan efektivitas pengawasan internal mampu menghasilkan laporan keuangan yang lebih informatif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini menggambarkan bahwa kualitas laporan keuangan bukan hanya hasil dari prosedur teknis pencatatan, tetapi merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini juga menempatkan laporan keuangan sebagai jembatan yang menghubungkan praktik akuntansi dan pengawasan dengan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik dan sistem pengawasan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan kemudian berkontribusi besar dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa perbaikan pada aspek pencatatan, pelaporan, serta mekanisme kontrol internal mampu menciptakan birokrasi yang lebih bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Kinerja instansi pemerintah sangat dipengaruhi oleh ketepatan dan keandalan informasi

keuangan, sehingga semakin baik pencatatan dan pengawasannya, semakin tinggi pula akuntabilitas yang dapat dicapai. Dengan demikian, sistem akuntansi dan pengawasan di sektor publik bukan hanya alat administratif, tetapi komponen strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Meskipun memberikan kontribusi penting, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, terutama terkait ruang lingkup sampel dan potensi bias persepsi yang muncul jika data diperoleh melalui kuesioner. Temuan yang bersumber dari satu wilayah tertentu tidak dapat digeneralisasi secara langsung untuk seluruh instansi pemerintah di Indonesia, mengingat setiap daerah memiliki kondisi birokrasi, sumber daya manusia, dan budaya organisasi yang berbeda. Selain itu, penelitian yang bersifat cross-sectional hanya menggambarkan hubungan pada satu titik waktu, sehingga belum mampu menunjukkan pengaruh jangka panjang secara mendalam. Walaupun demikian, penelitian ini tetap memberikan nilai akademis dan praktis yang signifikan karena menawarkan bukti empiris tentang pentingnya akuntansi sektor publik dan pengawasan dalam membangun akuntabilitas dan kinerja pemerintah.

ANALISIS JURNAL INTERNASIONAL 1

A. Identitas Jurnal

Nama Jurnal : Advances in Applied Accounting Research
Judul Jurnal : Evolving Perspectives on Public Sector Accounting Practices
Nama Penulis : Yaya Sonjaya
Volume : 2
Nomor : 2
Halaman : 110-122
Tahun Terbit : 2024
DOI : <https://doi.org/10.60079/aaar.v2i2.175>

B. Analisis Jurnal

Penelitian ini membahas perkembangan praktik akuntansi di sektor publik yang mengalami transformasi signifikan akibat globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan ekspektasi pemangku kepentingan. Praktik akuntansi sektor publik kini bergeser dari sistem tradisional menuju akuntansi berbasis akrual, di mana pencatatan pendapatan dan beban dilakukan secara lebih real time untuk mencerminkan kondisi keuangan secara akurat. Selain itu, integrasi kerangka pengukuran kinerja menjadi bagian penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah, sehingga setiap keputusan dan evaluasi kinerja dapat didukung data yang lebih transparan dan akuntabel. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi cara pencatatan dan pelaporan, tetapi juga menuntut adaptasi organisasi,

prosedur, dan keterampilan sumber daya manusia agar mampu memanfaatkan teknologi dan standar baru secara optimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi akrual di berbagai entitas pemerintahan membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Sistem ini memungkinkan posisi keuangan, kewajiban, dan pendapatan pemerintah tercatat dengan lebih akurat, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih efektif dan evaluasi kinerja lebih realistis. Di sisi lain, implementasi akuntansi akrual menimbulkan tantangan yang signifikan, termasuk kompleksitas sistem, peningkatan beban administrasi, kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten, serta kesulitan dalam menyesuaikan praktik dengan standar internasional. Penggunaan teknologi modern mempercepat proses pencatatan dan pelaporan, tetapi juga menuntut kesiapan infrastruktur, pengendalian risiko siber, dan kepatuhan terhadap prosedur keamanan data.

Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan bahwa transformasi akuntansi sektor publik dengan akuntansi akrual, pengukuran kinerja, dan teknologi modern dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, transparansi, dan akuntabilitas instansi pemerintah. Untuk mencapai manfaat maksimal, pemerintah perlu melakukan persiapan sistemik, pelatihan sumber daya manusia, serta memastikan regulasi dan standar diterapkan dengan konsisten. Perubahan ini membuka peluang bagi instansi publik untuk memperbaiki pengelolaan keuangan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik, namun juga menuntut komitmen dan adaptasi yang matang agar setiap inovasi dalam praktik akuntansi memberikan hasil yang optimal bagi tata kelola sektor publik.

ANALISIS JURNAL INTERNASIONAL 2

A. Identitas Jurnal

Nama Jurnal : Sinergi International Journal of Accounting & Taxation
Judul Jurnal : Transparency and Accountability in the Digital Era: Insights from Public Sector Accounting
Nama Penulis : Putri Ayu Lestari
Volume : 3
Nomor : 3
Halaman : 195-208
Tahun Terbit : 2025
DOI : <https://doi.org/10.61194/ijat-v3i3.864>

B. Analisis Jurnal

Penelitian ini membahas bagaimana transformasi digital membentuk praktik akuntansi sektor publik, dengan menekankan penerapan sistem akuntansi berbasis teknologi, e-government, dan pemanfaatan analitik data besar (big data analytics) untuk meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah. Digitalisasi akuntansi publik memungkinkan proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data menjadi lebih otomatis, efisien, dan akurat, sehingga meminimalkan kesalahan atau potensi kecurangan. Selain itu, penerapan platform pemerintahan elektronik mempermudah akses publik terhadap data keuangan, memperkuat keterbukaan informasi, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan pemerintah. Transformasi ini juga menekankan pentingnya integrasi antara teknologi dan praktik akuntansi, sehingga laporan keuangan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga instrumen strategis untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Meskipun potensi digitalisasi sangat besar, penelitian ini menyoroti sejumlah tantangan signifikan yang harus dihadapi oleh instansi publik. Infrastruktur teknologi yang memadai menjadi prasyarat utama, karena sistem yang lambat atau tidak stabil dapat menghambat proses pencatatan dan pelaporan. Selain itu, keamanan siber menjadi isu krusial; data keuangan yang sensitif rentan terhadap pembobolan, manipulasi, atau serangan siber lainnya jika tidak dilengkapi dengan protokol keamanan yang tepat. Tantangan lain yang tak kalah penting adalah kesiapan sumber daya manusia. Akuntan dan auditor perlu memiliki kemampuan digital yang memadai, pemahaman terhadap sistem baru, serta keterampilan analitis untuk memanfaatkan data secara efektif. Resistensi organisasi terhadap perubahan juga dapat menghambat implementasi teknologi baru, sehingga strategi manajemen perubahan menjadi bagian integral dari keberhasilan digitalisasi akuntansi sektor publik.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi akuntansi sektor publik memiliki peran strategis dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah. Untuk mewujudkan manfaat maksimal, transformasi digital harus didukung dengan investasi teknologi yang memadai, regulasi yang jelas, sistem keamanan siber yang kuat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang kompeten. Selain itu, implementasi digitalisasi harus disertai strategi perubahan organisasi yang efektif agar seluruh pemangku kepentingan dapat menyesuaikan diri dengan praktik baru. Dengan pendekatan yang komprehensif, digitalisasi akuntansi publik dapat menjadi katalis bagi pemerintahan yang lebih profesional, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

1. Laporan Realisasi Anggaran



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	REF	2023			2022
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
PENDAPATAN	V.1.a	2.038.485.069.000,00	2.066.978.403.884,77	101,40	2.022.884.629.933,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	V.1.a.1)	315.798.974.000,00	341.097.401.340,77	108,01	306.197.569.020,00
Pajak Daerah	V.1.a.1)a)	78.158.668.000,00	79.870.598.081,00	102,19	73.252.952.786,00
Retribusi Daerah	V.1.a.1)b)	17.499.028.000,00	18.495.089.831,00	105,69	14.737.903.034,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V.1.a.1)c)	20.269.337.000,00	20.501.788.972,00	101,15	19.664.097.904,00
Lain-lain PAD yang Sah	V.1.a.1)d)	199.871.941.000,00	222.229.924.456,77	111,19	198.542.615.296,00
PENDAPATAN TRANSFER	V.1.a.2)	1.710.813.595.000,00	1.715.757.338.360,00	100,29	1.701.873.475.073,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	V.1.a.2)a)	1.298.722.857.000,00	1.302.122.131.491,00	100,26	1.309.923.737.470,00
Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	V.1.a.2)a)(1)	31.399.405.000,00	31.399.406.511,00	100,00	30.623.375.722,00
Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	V.1.a.2)a)(2)	2.024.371.000,00	2.024.372.796,00	100,00	3.071.251.833,00
Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	V.1.a.2)a)(3)	859.598.255.000,00	873.966.993.979,00	101,67	829.967.362.159,00
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK)	V.1.a.2)a)(4)	405.700.826.000,00	394.731.358.206,00	97,30	446.261.747.756,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	V.1.a.2)b)	248.274.033.000,00	266.759.870.000,00	107,45	246.998.927.400,00
Dana Penyesuaian	V.1.a.2)b)(1)	248.274.033.000,00	266.759.870.000,00	107,45	246.998.927.400,00
Transfer Pemerintah Provinsi	V.1.a.2)c)	149.003.705.000,00	133.573.510.869,00	89,64	130.492.465.203,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	V.1.a.2)c)(1)	149.003.705.000,00	133.573.510.869,00	89,64	130.492.465.203,00
Bantuan Keuangan	V.1.a.2)d)	14.813.000.000,00	13.301.826.000,00	89,80	14.458.345.000,00
Bantuan Keuangan	V.1.a.2)d)	14.813.000.000,00	13.301.826.000,00	89,80	14.458.345.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	V.1.a.3)	11.872.500.000,00	10.123.664.184,00	85,27	14.813.585.840,00
Pendapatan Hibah	V.1.a.3)a)	11.872.500.000,00	10.123.664.184,00	85,27	14.813.585.840,00
BELANJA	V.1.b	1.730.792.242.000,00	1.647.583.698.825,92	95,19	1.714.438.611.980,00
BELANJA OPERASI	V.1.b.1)	1.575.294.525.100,00	1.508.049.203.835,92	95,73	1.471.430.199.482,00
Belanja Pegawai	V.1.b.1)a)	974.189.308.000,00	920.212.044.363,00	94,46	906.756.695.298,00
Belanja Barang dan Jasa	V.1.b.1)b)	535.369.422.100,00	517.976.822.843,92	96,75	504.509.085.809,00
Belanja Subsidi	V.1.b.1)c)	250.000.000,00	200.000.000,00	80,00	500.000.000,00
Belanja Hibah	V.1.b.1)d)	58.969.595.000,00	63.220.736.629,00	107,21	52.724.418.375,00
Belanja Bantuan Sosial	V.1.b.1)e)	6.516.200.000,00	6.439.600.000,00	98,82	6.940.000.000,00
BELANJA MODAL	V.1.b.2)	153.497.716.900,00	139.110.836.234,00	90,63	239.861.001.003,00
Belanja Modal Tanah	V.1.b.2)a)	0,00	0,00		1.939.517.420,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	V.1.b.2)b)	47.497.035.500,00	41.030.526.136,00	86,39	94.666.930.630,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	V.1.b.2)c)	65.317.659.400,00	63.804.819.655,00	97,68	64.867.182.942,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi	V.1.b.2)d)	32.214.518.000,00	25.882.600.301,00	80,34	72.155.586.099,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	V.1.b.2)e)	8.253.504.000,00	8.377.890.142,00	101,51	6.078.943.412,00
Belanja Modal Aset Lainnya	V.1.b.2)f)	215.000.000,00	15.000.000,00	6,98	152.840.500,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	V.1.b.3)	2.000.000.000,00	423.658.756,00	21,18	3.147.411.495,00
Belanja Tidak Terduga	V.1.b.3)	2.000.000.000,00	423.658.756,00	21,18	3.147.411.495,00

URAIAN	REF	2023			2022
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
TRANSFER	V.1.c	415.394.830.000,00	421.408.640.000,00	101,45	408.323.916.000,00
TRANSFER BAGI HASIL	V.1.c.1)	9.640.468.000,00	9.383.388.000,00	97,33	7.853.260.600,00
Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	V.1.c.1).a)	7.879.851.000,00	7.681.725.600,00	97,49	6.486.127.600,00
Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	V.1.c.1).b)	1.760.617.000,00	1.701.662.400,00	96,65	1.367.133.000,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	V.1.c.2)	405.754.362.000,00	412.025.252.000,00	101,55	400.470.655.400,00
Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	V.1.c.2).a)	405.754.362.000,00	412.025.252.000,00	101,55	400.470.655.400,00
SURPLUS/DEFISIT		(107.702.003.000,00)	(2.013.934.941,15)	1,87	(99.877.896.047,00)
PEMBIAYAAN	V.1.d				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	V.1.d.1)	113.064.503.000,00	113.064.503.748,00	100,00	224.246.511.372,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	V.1.d.1).a)	113.064.503.000,00	113.064.503.748,00	100,00	224.246.511.372,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	V.1.d.2)	5.362.500.000,00	4.375.482.849,00	81,59	11.304.109.577,00
Pembentukan Dana Cadangan	V.1.d.2).a)	0,00	75.482.849,00		6.004.109.577,00
Penyertaan Modal Daerah	V.1.d.2).b)	5.362.500.000,00	4.300.000.000,00	80,19	5.300.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	V.1.d	107.702.003.000,00	108.689.020.899,00	100,92	212.942.401.795,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	V.1.e	0,00	106.675.085.957,85		113.064.503.748,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini



BUPATI PURBALINGGA,

HAH HAYUNING PRATIWI

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	REF	2023	2022
Saldo Anggaran Lebih Awal	V.2.a	113.064.503.748,00	224.246.511.372,00
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	V.2.b	113.064.503.748,00	224.246.511.372,00
Sub Total		0,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	V.2.c	106.675.085.957,85	113.064.503.748,00
Sub Total		106.675.085.957,85	113.064.503.748,00
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
Lain-lain		0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	V.2.d	106.675.085.957,85	113.064.503.748,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini



BUPATI PURBALINGGA,

DIYAH HAYUNING PRATIWI

3. Neraca



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	REF	2023	2022
ASET	V.3.a		
ASET LANCAR	V.3.a.1)		
Kas di Kas Daerah	V.3.a.1).a)	85.740.955.742,00	82.147.768.662,00
Kas di Bendahara Penerimaan	V.3.a.1).b)	17.295.000,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	V.3.a.1).c)	48.800,00	0,00
Kas di BLUD	V.3.a.1).d)	14.653.335.239,85	30.096.476.283,00
Kas Dana BOS	V.3.a.1).e)	2.863.431.996,00	1.004.246.224,00
Kas Lainnya	V.3.a.1).f)	3.543.471.103,00	10.909.682,00
Piutang Pajak Daerah	V.3.a.1).g)	4.238.273.419,00	2.987.704.763,00
Piutang Retribusi Daerah	V.3.a.1).h)	2.756.057.097,00	3.357.111.006,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	V.3.a.1).i)	16.233.368.205,76	19.834.931.785,34
Piutang Transfer Antar Daerah	V.3.a.1).j)	4.111.697.072,00	1.832.816.292,00
Penyisihan Piutang	V.3.a.1).k)	(2.888.190.164,00)	(2.529.355.779,25)
Beban Dibayar Dimuka	V.3.a.1).l)	729.036.801,92	726.834.052,17
Persediaan	V.3.a.1).m)	34.543.737.512,66	39.580.634.464,90
JUMLAH ASET LANCAR	V.3.a.1)	166.542.518.825,19	179.050.077.445,16
INVESTASI JANGKA PANJANG	V.3.a.2)		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	V.3.a.2).a)		
Dana Bergilir	V.3.a.2).a)	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	V.3.a.2).b)		
Penyerahan Modal Pemerintah Daerah	V.3.a.2).b)	323.963.629.384,20	312.756.992.206,77
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	V.3.a.2)	323.963.629.384,20	312.756.992.206,77
ASET TETAP	V.3.a.3)		
Tanah	V.3.a.3).a)	677.734.273.815,00	600.119.779.116,00
Peralatan dan Mesin	V.3.a.3).b)	708.034.934.260,00	670.378.962.013,00
Gedung dan Bangunan	V.3.a.3).c)	1.239.353.843.489,00	1.202.770.477.386,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	V.3.a.3).d)	1.596.008.948.854,00	1.551.768.795.015,00
Aset Tetap Lainnya	V.3.a.3).e)	106.496.703.991,00	98.248.711.718,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	V.3.a.3).f)	82.279.424.744,00	65.482.445.814,00
Akumulasi Penyusutan	V.3.a.3).g)	(1.961.502.056.821,06)	(1.817.463.285.104,36)
JUMLAH ASET TETAP	V.3.a.3)	2.448.406.072.131,94	2.371.305.885.957,64
DANA CADANGAN	V.3.a.4)		
Dana Cadangan	V.3.a.4)	6.079.592.426,00	6.004.109.577,00
JUMLAH DANA CADANGAN	V.3.a.4)	6.079.592.426,00	6.004.109.577,00
ASET LAINNYA	V.3.a.5)		
Tagihan Jangka Panjang	V.3.a.5).a)	25.638.189,00	25.638.189,00
Aset Tidak Berwujud	V.3.a.5).b)	2.569.559.240,00	2.360.769.240,00
Aset Lain-lain	V.3.a.5).c)	7.101.753.399,77	15.476.110.500,46
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	V.3.a.5).d)	(1.899.332.199,88)	(1.550.979.423,93)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	V.3.a.5).e)	32.515.000,00	3.652.919.306,00
JUMLAH ASET LAINNYA	V.3.a.5)	7.830.133.628,89	19.964.457.811,53

URAIAN	REF	2023	2022
PROPERTI INVESTASI	V.3.a.6)		
Properti Investasi - Tanah	V.3.a.6).a)	46.884.121.725,00	0,00
Properti Investasi - Gedung Bangunan	V.3.a.6).b)	23.949.679.992,00	0,00
Akumulasi Penyusutan - Properti Investasi	V.3.a.6).c)	(3.595.926.042,83)	0,00
Jumlah Properti Investasi	V.3.a.6)	67.237.875.674,17	0,00
Jumlah Aset		3.020.059.822.070,39	2.889.081.522.998,10
KEWAJIBAN	V.3.b		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	V.3.b.1)		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	V.3.b.1).a)	143.452.923,00	187.290.113,00
Pendapatan Diterima Dimuka	V.3.b.1).b)	1.123.792.106,37	1.171.709.999,04
Utang Belanja	V.3.b.1).c)	41.216.621.786,00	23.152.539.439,87
Utang Jangka Pendek Lainnya	V.3.b.1).d)	484.080.598,75	491.687.598,75
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	V.3.b.1)	42.967.947.414,12	25.003.227.150,66
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	V.3.b.2)		
Utang Jangka Panjang Lainnya	V.3.b.2).a)	3.699.739.920,38	4.183.820.519,13
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	V.3.b.2)	3.699.739.920,38	4.183.820.519,13
Jumlah Kewajiban		46.667.687.334,50	29.187.047.669,79
EKUITAS	V.3.c		
EKUITAS	V.3.c	2.973.392.134.735,89	2.850.894.475.328,31
Jumlah Ekuitas		2.973.392.134.735,89	2.850.894.475.328,31
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		3.020.059.822.070,39	2.889.081.522.998,10

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini



BUPATI PURBALINGGA,

DIYAH HAYUNING PRATIWI

4. Laporan Operasional



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
LAPORAN OPERASIONAL
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	REF	2023	2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN-LO	V.4.a	1.855.065.655.180,84	1.866.051.639.373,55	(10.985.984.192,71)	(0,59)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	V.4.a.1)	390.314.480.141,92	319.922.778.847,45	30.391.711.294,47	9,50
Pajak Daerah-LO	V.4.a.1)(a)	81.080.341.513,91	73.244.791.505,28	7.848.549.578,63	10,72
Retribusi Daerah-LO	V.4.a.1)(b)	17.901.151.515,48	15.823.232.880,71	2.077.918.634,77	13,13
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	V.4.a.1)(c)	32.737.850.876,06	33.896.731.401,49	(958.880.525,43)	(2,85)
Lain-lain PAD yang Sah-LO	V.4.a.1)(d)	218.582.146.236,47	107.158.022.629,97	21.424.123.606,50	10,67
PENDAPATAN TRANSFER-LO	V.4.a.2)	1.438.481.917.067,90	1.439.115.263.317,00	(633.298.288,00)	(0,04)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan-LO	V.4.a.2)(a)	1.277.125.752.418,00	1.293.882.048.438,00	(16.756.294.020,00)	(1,30)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya-LO	V.4.a.2)(b)	12.201.947.000,00	0,00	12.201.947.000,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	V.4.a.2)(c)	149.154.217.649,00	145.223.196.879,00	3.921.060.770,00	2,70
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	V.4.a.3)	66.289.247.971,92	107.913.657.209,10	(40.764.409.237,18)	(38,07)
Pendapatan Hibah-LO	V.4.a.3)(a)	66.289.247.971,92	107.913.657.209,10	(40.764.409.237,18)	(38,07)
BEBAN	V.4.b	1.858.881.888.835,53	1.807.299.755.921,40	51.292.132.914,13	2,84
Beban Pegawai	V.4.b.1)	935.531.758.693,00	900.680.643.337,70	34.851.115.355,30	3,87
Beban Barang dan Jasa	V.4.b.2)	487.446.022.801,30	493.297.864.169,73	(5.851.841.368,43)	(1,19)
Beban Subsidi	V.4.b.3)	300.000.000,00	500.000.000,00	(300.000.000,00)	(60,00)
Beban Hibah	V.4.b.4)	99.852.809.719,25	63.269.529.287,97	36.583.280.431,28	57,82
Beban Bantuan Sosial	V.4.b.5)	6.439.600.000,00	7.536.881.144,00	(1.097.281.144,00)	(14,56)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	V.4.b.6)	156.040.919.635,98	173.140.905.211,65	(17.099.985.575,97)	(9,88)
Beban Penyisihan Piutang	V.4.b.7)	628.054.259,67	791.924.606,90	(163.870.347,23)	(20,69)
Beban Lain-lain	V.4.b.8)	5.329.824.726,83	6.592.322.163,45	(1.262.697.436,62)	(19,15)
Beban Transfer	0V.4.b.9)	167.033.069.000,00	161.399.686.000,00	5.633.413.000,00	3,49
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	V.4.c	(3.436.233.654,69)	58.841.883.452,15	(62.278.117.106,84)	(105,64)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	V.4.d				
Surplus Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO	V.4.d.1)	91.150.400,00	22.058.500,00	69.091.900,00	313,26
Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO	V.4.d.2)	9.170.827.321,50	1.319.612.861,65	7.851.214.459,85	594,96
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	V.4.e	(9.079.676.921,50)	(1.297.554.361,65)	(7.782.120.559,85)	599,76
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	V.4.f	(12.515.910.576,19)	57.544.327.090,50	(70.060.237.666,69)	(121,75)
POS LUAR BIASA	V.4.g				
Pendapatan Luar Biasa - LO	V.4.g.1)	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Beban Luar Biasa	V.4.g.2)	423.658.756,00	1.238.878.280,00	(815.219.524,00)	(65,89)
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	V.4.h	(423.458.756,00)	(1.238.878.280,00)	815.419.524,00	(65,82)
SURPLUS/DEFISIT LO	V.4.i	(12.939.369.332,19)	56.305.448.810,50	(69.244.818.142,69)	(122,98)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini



BUPATI PURBALINGGA,

SYAH HAYUNING PRATIWI

5. Laporan Arus Kas



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
LAPORAN ARUS KAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	REF	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	V.5.a		
Arus Masuk Kas	V.5.a.1)		
Penerimaan Pajak Daerah	V.5.a.1).a)	79.870.598.081,00	73.252.952.786,00
Penerimaan Retribusi Daerah	V.5.a.1).b)	18.495.089.831,00	14.737.903.034,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V.5.a.1).c)	20.501.768.972,00	19.684.097.904,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	V.5.a.1).d)	221.527.176.856,77	198.099.418.796,00
Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	V.5.a.1).e)	1.302.122.131.491,00	1.309.923.737.470,00
Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	V.5.a.1).f)	266.759.870.000,00	246.998.927.400,00
Penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi	V.5.a.1).g)	133.573.510.869,00	130.492.465.203,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	V.5.a.1).h)	13.301.826.000,00	14.458.345.000,00
Penerimaan Pendapatan Hibah	V.5.a.1).i)	10.123.664.184,00	14.813.585.840,00
Jumlah Arus Masuk Kas	V.5.a.1)	2.666.275.886.284,77	2.622.441.433.433,00
Arus Keluar Kas	V.5.a.2)		
Pembayaran Pegawai	V.5.a.2).a)	920.212.044.363,00	906.756.695.298,00
Pembayaran Barang dan Jasa	V.5.a.2).b)	517.976.822.843,82	504.509.085.809,00
Pembayaran Subsidi	V.5.a.2).c)	200.000.000,00	500.000.000,00
Pembayaran Hibah	V.5.a.2).d)	63.220.736.629,00	52.724.418.375,00
Pembayaran Bantuan Sosial	V.5.a.2).e)	6.439.600.000,00	6.940.000.000,00
Pembayaran Tidak Terduga	V.5.a.2).f)	423.658.756,00	3.147.411.495,00
Pembayaran Bagi Hasil	V.5.a.2).g)	9.383.388.000,00	7.853.260.600,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	V.5.a.2).h)	412.025.252.000,00	400.470.655.400,00
Jumlah Arus Keluar Kas	V.5.a.2)	1.929.881.502.591,92	1.882.901.526.977,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	V.5.a	136.394.153.692,85	139.539.906.456,00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	V.5.b		
Arus Masuk Kas	V.5.b.1)		
Hasil Penjualan atas Peralatan dan Mesin	V.5.b.1).a)	140.582.200,00	5.190.000,00
Hasil Penjualan atas Gedung dan Bangunan	V.5.b.1).b)	416.015.000,00	304.700.000,00
Hasil Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	V.5.b.1).c)	55.000.000,00	111.250.000,00
Hasil Penjualan atas Aset Lainnya	V.5.b.1).d)	91.150.400,00	22.066.500,00
Jumlah Arus Masuk Kas	V.5.b.1)	702.747.600,00	443.196.500,00
Arus Keluar Kas	V.5.b.2)		
Perolehan Tanah	V.5.b.2).a)	0,00	1.939.517.420,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	V.5.b.2).b)	41.030.526.136,00	94.686.930.630,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	V.5.b.2).c)	63.804.819.655,00	64.667.182.942,00
Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	V.5.b.2).d)	25.882.600.301,00	72.155.588.099,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	V.5.b.2).e)	8.377.890.142,00	6.078.943.412,00
Perolehan Aset Lainnya	V.5.b.2).f)	15.000.000,00	152.840.500,00
Pembentukan Dana Cadangan	V.5.b.2).g)	75.482.849,00	6.004.109.577,00
Penyertaan Modal Daerah	V.5.b.2).h)	4.300.000.000,00	5.300.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	V.5.b.2)	143.486.319.683,00	251.168.110.580,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	V.5.b	(142.783.571.483,00)	(250.721.914.080,00)

URAIAN	REF	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	V.5.c		
Arus Masuk Kas			
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
Arus Keluar Kas			
Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		0,00	0,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	V.5.d		
Arus Masuk Kas	V.5.d.1)		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	V.5.d.1).a)	108.828.095.827,00	121.848.445.812,00
Pengembalian Sisa UP Tahun Sebelumnya	V.5.d.1).b)	0,00	9.422.913,00
Penerimaan Pengembalian DAK Non Fisik - BOP PAUD	V.5.d.1).c)	0,00	7.607.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	V.5.d.1)	108.828.095.827,00	121.865.475.825,00
Arus Keluar Kas	V.5.d.2)		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	V.5.d.2).a)	108.869.933.017,00	122.526.380.520,00
Pengeluaran Pengembalian DAK Non Fisik - BOP PAUD	V.5.d.2).b)	7.607.000,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	V.5.d.2)	108.877.540.017,00	122.526.380.520,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	V.5.d	(51.444.190,00)	(660.904.695,00)
Kenaikan/ Penurunan Kas	V.5.e	(6.440.861.880,18)	(111.842.912.619,00)
Saldo Awal Kas	V.5.f	113.289.400.861,00	225.192.313.480,00
Terdiri dari:			
Saldo Awal Kas di Kas Daerah	V.5.f	82.147.768.662,00	122.357.541.043,00
Saldo Awal Kas di BLUD	V.5.f	30.096.476.283,00	97.186.503.232,00
Saldo Awal Kas Dana BOS	V.5.f	1.004.248.234,00	5.558.269.205,00
Saldo Awal Kas Lainnya	V.5.f	10.909.692,00	0,00
Total Saldo Awal Kas	V.5.f	113.289.400.861,00	225.192.313.480,00
Saldo Akhir Kas	V.5.g	106.818.538.880,85	113.289.400.861,00
Terdiri dari:			
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	V.5.g	85.740.965.742,00	82.147.768.662,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	V.5.g	17.296.000,00	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	V.5.g	48.800,00	0,00
Saldo Akhir Kas di BLUD	V.5.g	14.653.335.239,85	30.096.476.283,00
Saldo Akhir Kas Dana BOS	V.5.g	2.863.431.996,00	1.004.248.234,00
Saldo Akhir Kas Lainnya	V.5.g	3.543.471.103,00	10.909.692,00
Total Saldo Akhir Kas	V.5.g	106.818.538.880,85	113.289.400.861,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini



BUPATI PURBALINGGA,

NIYAH HAYUNING PRATIWI

6. Laporan Perubahan Ekuitas



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	REF	2023	2022
EKUITAS AWAL	V.6.a	2.859.894.475.328,31	2.819.997.333.638,87
SURPLUS/DEFISIT LO	V.6.b	(12.939.369.332,19)	56.305.448.810,50
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar:	V.6.c	126.437.028.739,77	(16.408.307.121,06)
Koreksi Ekuitas - Mutasi Aset Tetap	V.6.c.1)	125.859.768.831,23	(18.375.222.327,99)
Koreksi Ekuitas - Pencatatan Piutang	V.6.c.2)	88.707.637,92	8.079.008,18
Koreksi Ekuitas - Lainnya	V.6.c.3)	(45.600.000,00)	60.000.000,00
Koreksi Ekuitas - Pencatatan Utang	V.6.c.4)	534.152.270,62	1.898.836.198,75
EKUITAS AKHIR	V.6.d	2.973.392.134.735,89	2.859.894.475.328,31

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini



BUPATI PURBALINGGA,

DIYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber: <https://bakeuda.purbalinggakab.go.id/wp-content/uploads/2024/11/LKPD-Tahun-2023-audited.pdf>